

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Berdirinya suatu perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suatu perusahaan bergerak didalam bidang yang berbeda-beda pula. Perusahaan PT. Aneka Era Baru bergerak dalam bidang distributor sepatu yang memiliki sejarah tersendiri dimulai sejak rencana pendiriannya sampai sekarang ini.

Pendirian perusahaan ini dimulai sejak tahun 1970-an oleh PT. Cahaya Berlian Lestari yang dapat memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan dan pihak lain yang membutuhkan jasa dari perusahaan ini. Selain itu dapat membantu masyarakat sekitar dalam memberikan lapangan pekerjaan dan menggunakan produk-produk sepatu yang bermacam-macam bentuknya. Perusahaan ini terus berkembang sampai saat ini dan terutama bergerak dalam proses perdagangan (perusahaan dagang) yang mempunyai modal berbeda-beda dari pemegang saham.

4.1.2. Lokasi perusahaan

Keputusan untuk memilih suatu lokasi perusahaan mempunyai efek yang sangat penting bagi kesuksesan tidaknya operasi perusahaan berdasarkan **pertimbangan-pertimbangan** yang teliti dan terarah.

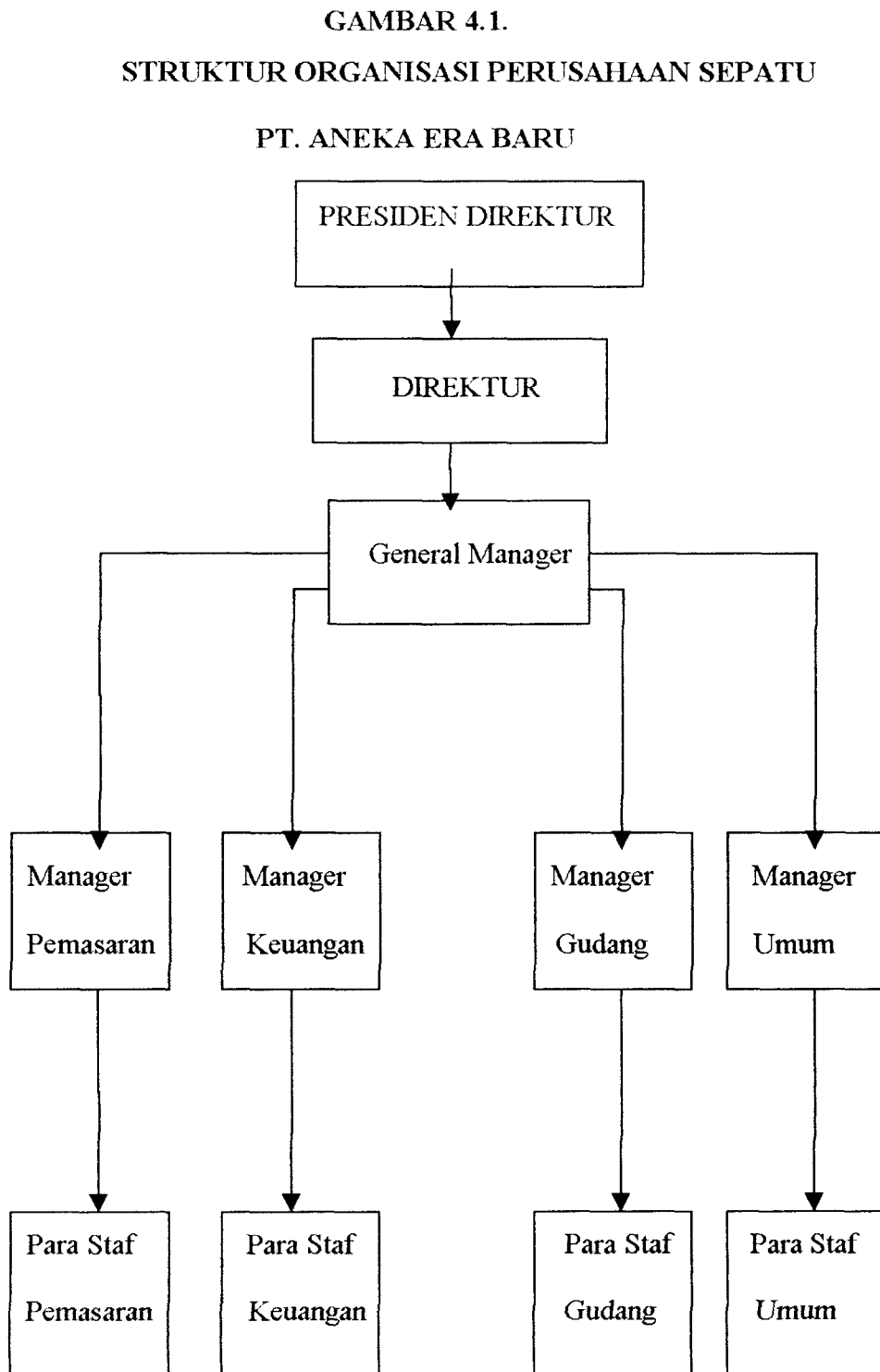
Lokasi perusahaan PT. Aneka Era Baru terletak di Jalan Komplek Permata Juanda West Wing Superblok B/3-7, Sidoarjo. Manfaat yang didapat dari lokasi perusahaan tersebut :

- Biaya pengiriman termasuk gaji sopir dan bahan bakar relatif murah.
- Mudah memperoleh tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman kerja.
- Ruang lingkup dan wilayah pemasaran yang cukup besar di seluruh Jawa Timur menyebabkan perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk meraih pangsa pasar yang luas, sehingga membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi pengangguran.
- Memacu dan memotivasi semangat perdagangan dan dunia usaha yang sedang lesu karena dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan.
- Sebagai acuan bagi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dibidang sepatu maupun dibidang lainnya.

4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka usah untuk mencapai tujuan.

Adapun struktur organisasi pada perusahaan sepatu PT. Aneka Era Baru adalah sebagai berikut :



Pada gambar terlihat bahwa pimpinan tertinggi di tangan direktur yang dibantu oleh general manager. General manager dibantu oleh empat orang manager yaitu :

1. Manager Pemasaran
2. Manager Keuangan
3. Manager Gudang
4. Manager Umum dan Personalia.

Setiap manager membawahi beberapa orang staff di bidangnya masing-masing. Pelimpahan tugas dan wewenang dalam perusahaan :

- ☛ Direksi melimpahkan tugas dan wewenang kepada general manager.
- ☛ General Manager melimpahkan tugas dan wewenang kepada para manager.
- ☛ Staff mengerjakan tugas yang diatur manager dan bertanggung jawab kepada manager.

4.1.4. Batas-batas Wewenang

Dalam menjalankan tugas, setiap jabatan memiliki wewenang yang dilimpahkan dari atasan untuk mempermudah proses pelaksanaan kerja. Berikut ini adalah pembagian tugas dan wewenang masing-masing jabatan.

A. Direksi

Direksi adalah pemimpin perusahaan tertinggi dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi bertanggung jawab kepada presiden direktur grup perusahaan.

Tugas Direktur :

1. Menjalankan kepemimpinan manajemen puncak sesuai dengan wewenang yang diterima dari Presiden Direktur.
2. Dalam menjalankan tugasnya. tindakan yang diambil harus sesuai dengan peraturan perusahaan.
3. Memotivasi karyawan dengan memberi insentif yang sesuai dengan hasil yang dicapai bawahan.
4. Menanamkan kedisiplinan dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan bawahan.
5. Mengelola dan menjaga kekayaan perusahaan.
6. Membuat keputusan-keputusan yang vital dan fundamental bagi perusahaan.
7. Menjalankan tugas Khusus dari Presiden Direktur.

B. General Manager

General Manager adalah pembantu utama Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Tugas General Manager :

1. Membuat anggaran perusahaan (budget) dengan persetujuan direktur.
2. Membantu direktur dalam mengelola sumber daya perusahaan.
3. Membantu direktur melakukan kontrol atas kekayaan perusahaan.
4. Mengkoordinasikan semua bagian dalam perusahaan dengan membentuk sistem kerjasama diantara para manager perusahaan.
5. Menyusun penempatan karyawan dan membuat deskripsi jabatan.

6. Mengadakan validasi terhadap pemberian kredit kepada customer yang jumlah besar sesuai dengan wewenangnya.
7. Melaksanakan tugas khusus dari direktur.

C. Manager Penjualan

Manager Penjualan bertanggung jawab kepada direktur dengan pengawasan langsung general manager.

Tugas Manager Penjualan :

1. Mengkoordinir salesman untuk mendapatkan pangsa pasar potensial yang seluas-luasnya.
2. Mengatur strategi pemasaran seperti di dalam dan di luar negeri.
3. Melaporkan data penjualan ke bagian akuntansi.
4. Mengadakan penelitian terhadap pesaing dan pangsa pasar.
5. Mengadakan survey lapangan.
6. Menjaga sistem pengambilan dan pengembalian barang oleh para salesman.
7. Melakukan kontrol pengembalian barang dari retur langganan.
8. Berkoordinasi dengan bagian lain dalam perusahaan dan melaksanakan tugas khusus direktur.
9. Mengatur kegiatan promosi.

D. Salesman

Salesman bertanggung jawab kepada manager penjualan.

Tugas Salesinan :

1. Menjual produk perusahaan secara langsung kepada konsumen minimal sejumlah target penjualan yang sudah ditetapkan.
2. Melaksanakan program survey lapangan.
3. Memperluas pangsa pasar.
4. Membina hubungan baik dengan konsumen.
5. Mempromosikan dan menjaga nama baik perusahaan.
6. Melakukan kegiatan promosi yang diatur oleh manager penjualan.
7. Melaporkan hasil penjualan dan biaya perjalanan dinas kepada manager penjualan setiap minggu.

E. Manager Keuangan

Manager Keuangan bertanggung jawab kepada direktur dengan pengawasan langsung general manager.

Tugas Manager Keuangan :

1. Membuat laporan keuangan.
2. Mengawasi pelaksanaan sistem akuntansi yang sudah ada.
3. Membuat laporan pajak bulanan dan tahunan.
4. Menyusun alur kas (*cash flow*) untuk pembiayaan kegiatan perusahaan.
5. Mengawasi pengeluaran biaya dan penagihan piutang yang dilakukan salesman.

6. Melaksanakan tugas khusus **direktur**.

F. Staf Keuangan

Staf Keuangan terdiri dari bagian hutang, piutang kas dan bank (kasir), dan bagian pajak yang semuanya bertanggungjawab kepada manager keuangan.

Tugas Staf Keuangan :

1. Menginput semua jenis transaksi keuangan ke dalam komputer yang sudah merupakan jaringan **network** yang selalu on-line.
2. Mengadakan cross **check** dan tugas penting :
 - Bagian pembelian atau bagian hutang dengan bagian administrasi gudang mengenai jumlah persediaan yang ada di gudang.
 - Bagian pembelian atau bagian hutang dengan pemegang faktur pajak pembelian ash mengenai jumlah PPN yang harus dibayar.
 - Bagian pembelian atau bagian hutang harus mengirimkan konfirmasi saldo hutang dagang kepada supplier.
 - Bagian piutang dengan bagian penagihan mengenai jumlah piutang langganan.
 - Bagian piutang menyimpan nota asli penjualan kredit kepada langganan.
 - Bagian piutang mengirimkan konfirmasi saldo piutang kepada langganan.
 - Bagian piutang memeriksa pemberian komisi kepada salesman dan sistem penentuan potongan harga kepada langganan.
 - Kasir membuat rekonsiliasi saldo bank dengan buku bank.

- Kasir menyimpan uang tunai dan giro dan setiap hari **harus** mengadakan kas opname yang disaksikan oleh manager keuangan.
- Kasir membuat laporan kas harian yang setiap hari disampaikan kepada general manager dengan pemeriksaan langsung terlebih dahulu oleh manager keuangan.

G. Manager Gudang

Manager Gudang diperlukan karena banyaknya jenis barang yang diperdagangkan sehingga diperlukan pengawasan terhadap persediaan secara insentif. Manager gudang bertanggungjawab kepada direktur dengan pengawasan langsung general manager.

Tugas Manager Gudang :

1. Mengawasi transaksi penerimaan dan pengeluaran barang gudang.
2. Memeriksa **cross** check antar administrasi gudang dengan bagian hutang di bagian keuangan terutama pada jenis barang yang rawan hilang.
3. Mengkoordinasi penjagaan dan pengawasan secara fisik terhadap barang gudang.
4. Menjaga pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran barang gudang.
5. Mengkoordinasikan jadwal pengiriman barang yang dijual kepada langganan agar tepat waktu.
6. Melaksanakan tugas khusus direktur.

H.Staf Gudang

Staf Gudang terdiri dari bagian administrasi gudang, sopir, pengawas barang dan buruh harian. Semuanya bertanggung jawab kepada manager gudang.

Tugas Staf Gudang :

1. Bagian administrasi gudang bertugas :

- Harus mengimput transaksi penerimaan dan pengeluaran barang gudang.
- Mengadakan cross check saldo persediaan dengan bagian pembelian setiap periode tertentu.
- Mengawasi penerimaan barang kembali dari salesman berupa retur barang **rusak**, retur barang baik dan pengembalian barang yang dipinjam salesman untuk diperdagangkan keluar kota.

2. Sopir bertugas :

- Mengantarkan barang yang dipesan pelanggan.
- Mengantarkan salesman berkeliling daerah Jawa Timur untuk menjual produk perusahaan.
- Ikut menjaga keamanan barang selama dalam perjalanan.

3. Pengawas Gudang bertugas :

- Mengawasi secara langsung bongkar muat barang pada setiap mobil.
- Mengadakan *cross* check dengan administrasi gudang mengenai jumlah barang yang akan dipinjam salesman apakah sesuai dengan barang yang dimuat.
- Mengawasi barang-barang yang berada di dalam gudang.

4. Buruh harian bertugas :

- Menaikkan dan menurunkan barang dari mobil.
- Membantu mengawasi barang-barang di gudang.

I. Manager Umum dan Personalia

Manager Umum dan Personalia bertanggungjawab langsung kepada direktur

Tugas Manager Umum dan Personalia :

1. Menjaga kedisiplinan kerja karyawan.
2. Mengatur pembayaran upah buruh harian dan sopir.
3. Mengadakan pembelian keperluan rumah tangga perusahaan.
4. Mengatur keperluan dan kepentingan umum perusahaan.
5. Membuat laporan bulanan kepada direktur mengenai performance karyawan.

J. Staf Umum dan Personalia

Staf Umum dan Personalia adalah bagian administrasi umum dan personalia bertanggungjawab kepada manager umum dan personalia.

Tugas Staf Umum dan Personalia :

1. Membuat rekap daftar hadir dan keterlambatan dari kartu check clock masing-masing karyawan.
2. Mencatat biaya pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga perusahaan dan menyerahkan laporan tersebut kepada manager umum dan personalia untuk diperiksa.
3. Membeli barang-barang keperluan rumah tangga perusahaan.

4.1.5. Upah dan Sistem Pengajian

Upah dan sistem pengajian dalam perusahaan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

- a. Tenaga kerja bulanan adalah tenaga kerja yang memperoleh gaji secara bulanan yang terdiri dari karyawan yang bekerja di kantor.
- b. Tenaga kerja harian adalah tenaga kerja yang memperoleh gaji secara harian yaitu berdasarkan atas kehadiran karyawan pada hari kerja.
- c. Jam kerja.

Jam kerja berlaku mulai dari hari senin sampai hari sabtu pada hari minggu libur. **Tetapi** hari besar lainnya dan hari minggu dapat digunakan sebagai hari kerja, tetapi sistem penggajiannya dihitung sebagai kerja lembur.

Adapun **jam** kerja sebagai berikut :

- Jam masuk : pukul 08.00 – 12.00 WIB
- Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB
- Jam masuk : pukul 13.00 – 16.00 WIB

Untuk lebih meningkatkan semangat kerja karyawan, maka perusahaan memberikan berbagai macam tunjangan antara lain :

- (a) Tunjangan Hari Raya diberikan dalam bentuk uang.
- (b) Tunjangan akhir tahun diberikan dalam bentuk bonus yang berupa liburan **dan** hadiah.
- (c) Pengobatan.

4.1.6. Tujuan Perusahaan

Didalam melaksanakan kegiatan usahanya setiap perusahaan tentu memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan laba yang besar. Adapun cara yang dilakukan oleh PT. Aneka Era Baru untuk mencapai tujuan tersebut sebagai berikut :

1. **Mengefisienkan biaya.**

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya harus ditekan sekecil mungkin, agar biaya yang ditanggung oleh perusahaan tidak terlalu besar. Sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.

2. **Meningkatkan keuntungan.**

Sesuai dengan prinsip perusahaan untuk mencari laba, maka perusahaan harus selalu berusaha dengan berbagai cara untuk meningkatkan keuntungan atau laba yang diperolehnya.

4.1.7. Pemasaran

- a. Daerah pemasaran perusahaan ini adalah kota Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya serta bahkan luar pulau.

- b. Penentuan kebijaksanaan harga.

Menetapkan harga jual produk perusahaan berdasarkan harga pokok produksi ditambah prosentase tertentu sebagai keuntungan atau laba.

4.1.8. Sumber Dana Perusahaan

Jumlah dana yang dimiliki oleh perusahaan sepatu PT. Aneka Era Baru diperoleh dari sumber dana para pemegang saham :

1. PT. Cahaya Berlian Lestari	: Rp. 8.500.000.000
2. Benny Susanto	: Rp. 650,000,000
3. Kartnan Susilo	: Rp. 350,000,000
4. Sugianto Hermawan	: Rp. 250,000,000
5. Budi Susanto	: Rp. 250,000,000
	Rp. 10,000,000,000

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Permasalahan

PT. Aneka Era Baru merupakan pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada khususnya. Sehubungan dengan usaha yang dilakukannya, maka PT. Aneka Era Baru berkewajiban untuk menghitung dan menyetorkan pajak pertambahan nilainya ke kas negara. Pajak Pertambahan Nilai yang dimaksud adalah pajak pertambahan nilai atas seluruh penerimaan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Dalam membukukan transaksi-transaksi ekonominya, maka perusahaan tersebut menggunakan tahun kalender (1 Januari sampai 31 Desember) untuk mengetahui besarnya PPN yang diperhitungkan dalam satu periode akuntansi

yang terdiri dari dua macam pajak, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran dimana keduanya saling mempengaruhi.

Kesulitan yang dihadapi perusahaan adalah membandingkan atau mempertemukan antara pajak masukan yang merupakan kredit pajak dengan pajak keluaran yang merupakan utang pajak. Pajak masukan yang seharusnya sudah dikreditkan pada bulan **ini** baru akan dikreditkan atau dibukukan faktur pajak penjualan pada tiga atau empat bulan ataupun juga berapa bulan mendatang sesuai dengan permintaan pelanggannya.

Pada setiap proses pencatatan akuntansi perusahaan sedapat mungkin biaya harus dihubungkan dengan pendapatan, agar dihasilkan perbandingan yang wajar antara pendapatan dan biaya (*Matching Concept*). Untuk mendapatkan kelayakan ekonomi dalam perbandingan pajak masukan dan pajak keluaran maka harus ada penerapan dari dasar-dasar perbandingan yang baik berupa hubungan sebab akibat, alokasi sistematis pada perhitungan PPN khususnya dalam membebankan pajak masukan dan pajak keluaran.

Berdasarkan sistem alokasi sistematis, unitnya adalah perbandingan biaya harus dihubungkan dengan periode terjadinya pendapatan. Permasalahan yang terjadi pada PT. Aneka Era Baru adalah akibat dari perbandingan pajak masukan dengan pajak keluaran yang tidak sesuai dengan periode terjadinya. Dimana akibat dari kesalahan tersebut dapat mempengaruhi sebagian dari yang ada dalam neraca maupun perhitungan laba rugi perusahaan.

PPN masukan yang dibayar oleh perusahaan tersebut saat pembelian Barang Kena Pajak dikreditkan dengan PPN keluaran yang dipungut pada saat

penyerahan BKP tersebut kepada pembeli. Tetapi pada kenyataannya pelanggan menginginkan pembukaan pembukuan faktur tersebut ditunda sementara, menunggu barang tersebut laku terjual. Dan hal ini dapat berlangsung melebihi batas waktu maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan, yaitu 30 hari setelah tanggal penyerahan BKP yang mengakibatkan perbandingan atas pajak pertambahan nilai masukan perusahaan tersebut menjadi tidak seimbang. Keadaan ini juga mengakibatkan munculnya perkiraan-perkiraan pada neraca dan laporan laba rugi tidak seharusnya ada.

Standar Akuntansi Keuangan sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenaan akuntansi pada perhitungan PPN. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan dalam perhitungan PPN perusahaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal pertama, PT. Aneka Era Baru menggunakan laporan keuangan sebagai sarana untuk menyajikan informasi dari transaksi-transaksi yang ada. Dari transaksi-transaksi tersebut pembayaran pajak merupakan transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Adanya bermacam-macam pihak yang berkepentingan tersebut maka harus ada prinsip akuntansi yang dipakai sebagai standar agar pesan yang disampaikan dalam laporan keuangan dapat diartikan sama oleh semua **pihak** yang berkepentingan.

PT. Aneka Era Baru sebagai perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan yang akan dipakai oleh berbagai pihak, maka di dalam semua transaksi termasuk perhitungan PPN selayaknya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi tersebut. Kedua keterlibatan SAK disebabkan karena komponen-komponen PPN yaitu pajak masukan dan pajak keluaran mengandung konsep atau pemikiran akuntansi. Mempertemukan pajak masukan dengan pajak keluaran seperti tertera dalam Undang-Undang yang berlaku seolah-olah merupakan realisasi dari prinsip penetapan beban dan pendapatan (*matching cost against revenue*) yang terdapat dalam SAK. Maka segala pemikiran yang terkandung dalam konsep dasar akuntansi tersebut dapat diterapkan dalam perhitungan PPN, khususnya pada PT. Aneka Era Baru yang menjadi obyek penelitian skripsi ini.

4.2.2. Proses Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut UU PPN No.11 Tahun 1994.

Pajak Masukan (PM) merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada Barang Kena Pajak (BKP) yang masuk atau dibeli oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Besarnya pajak masukan adalah 10% dari harga pembelian barang kena pajak.

Pajak Keluaran (PK) merupakan komponen PPN yang dikerjakan pada Barang Kena Pajak (BKP) yang dikeluarkan atau dijual oleh PKP. Pajak keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPN yang dijual kepada pelanggan. Berdasarkan UU PPN No. 11 tahun 1994

pasal 7 ayat 1 dan 2, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar **10%**, sedangkan tarif pajak Pertambahan Nilai **atas** barang-barang yang diekspor dikenakan tarif 0%.

Dengan mengambil contoh perhitungan PPN bulan Oktober **1999** sampai dengan Desember **1999** sebagai berikut :

✳ Masa pajak Oktober 1999 :

- Pembelian BKP	= Rp. 4.308.046,994
- Penjualan ekspor	= Rp. 606,368,030
- Penjualan BKP pada PKP	= Rp. 2,182,746,607
- Penjualan BKP bukan PKP	= Rp. 526,594,325 +
Total penjualan	= Rp. 3.315,708,962

Perhitungan pajak :

1. Pajak Keluaran (PK) :

a. Atas ekspor BKP	= 0
b. Atas penjualan BKP kepada PKP	
10% x Rp. 2,182,746,607	= Rp. 218,274,660.7
c. Atas penjualan BKP kepada bukan PKP *)	= Rp. 52,659,432.5 +
Jumlah Pajak Keluaran bulan Oktober	= Rp. 270,934,093.2

2. Pajak Masukan (PM) :

a. Atas seluruh pembelian BKP	
10% x Rp. 4,308,046,991	= Rp 430,804,699.4

*) Jumlah PPN belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN

b. Atas persediaan BKP :

Pembelian BKP = Rp. 4,308,046,994

HPP = Rp. 4,147,196,536 -

Persediaan **akhir** Oktober = Rp. 160,850,458

Pajak Masukan atas persediaan bulan Oktober :

10% x Rp. 160,850,458 = Rp. 16,085,045.8 -

Jumlah Pajak Masukan bulan Oktober = Rp. 414,719,653.6

✳ Masa pajak November 1999 :

– Pembelian BKP = Rp. 4,713,274,321

– Penjualan ekspor = Rp. 1,416,306,736

– Penjualan BKP kepada PKP = Rp. 2,097,401,230

– Penjualan BKP bukan PKP = Rp. 514,610,352 +

Total Penjualan = Rp. 4,028,318,318

Perhitungan pajak :

1. Pajak Keluaran (PK) :

a. Atas ekspor BKP = 0

b. Atas penjualan BKP kepada PKP

10% x Rp. 2,097,401,230 = Rp. 209,740,123

c. Atas penjualan BKP kepada bukan PKP *) = Rp. 51,461,035.2+

Jumlah Pajak Keluaran bulan November = Rp. 261.201,158.2

*) Jumlah PPN belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN

2. Pajak Masukan (PM) :

- a. **Atas** seluruh pembelian BKP

$$10\% \times \text{Rp. } 4,713,274,321 = \text{Rp. } 471,327,432.1$$

- b. **Atas** persediaan bulan Oktober = Rp. 16,085,045.8+

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 487,412,477.9$$

- c. **Atas** persediaan bulan November :

$$\text{Persediaan awal bulan November} = \text{Rp. } 160,850,458$$

$$\text{Pembelian bulan November} = \text{Rp. } 4,713,274,321 +$$

$$\text{Tersedia dijual} = \text{Rp. } 4,874,124,779$$

$$\text{HPP} = \text{Rp. } 3,959,385,132 -$$

$$\text{Persediaan akhir bulan November} = \text{Rp. } 914,739,647$$

Pajak Masukan atas persediaan bulan November :

$$10\% \times \text{Rp. } 914,739,647 = \text{Rp. } 91,473,964.7 -$$

$$\text{Jumlah Pajak Masukan bulan November} = \text{Rp. } 395,938,513.2$$

✳ Masa Pajak Desember 1999 :

$$- \text{ Pembelian BKP} = \text{Rp. } 3,917,805,586$$

$$- \text{ Penjualan ekspor} = \text{Rp. } 926,711,174$$

$$- \text{ Penjualan BKP pada PKP} = \text{Rp. } 2,231,480,469$$

$$- \text{ Penjualan BKP bukan PKP} = \text{Rp. } 346,504,831 +$$

$$\text{Total penjualan} = \text{Rp. } 3,504,696,474$$

Perhitungan pajak :

1. Pajak Keluaran (PK) :

a. Atas ekspor BKP	=	0
b. Atas penjualan BKP kepada PKP		
$10\% \times \text{Rp. 2,231,480,469}$	=	Rp. 223,148,046.9
c. Atas penjualan BKP kepada bukan PKP *)	=	Rp. 34,650,483.1 +
Jumlah Pajak Keluaran bulan Desember	=	Rp. 257,798,530

2. Pajak Masukan (PM) :

a. Atas seluruh pembelian BKP		
$10\% \times \text{Rp. 3,917,805,586}$	=	Rp. 391,780,558.6
b. Atas persediaan bulan November	=	Rp. 91,473,964.7 +
Jumlah	=	Rp. 483,254,523.3

c. Atas persediaan bulan Desember :

Persediaan awal bulan Desember = Rp. 914,739,647

Pembelian bulan Desember = Rp. 3,917,805,586 +

Tersedia di jual = Rp. 4,832,545,233

HPP = Rp. 4,153,064,282 -

Persediaan akhir bulan Desember = Rp. 679,480,951

Pajak Masukan atas persediaan bulan Desember :

$10\% \times \text{Rp. 679,480,951}$ = Rp. 67,948,095.1 -

Jumlah Pajak Masukan bulan Desember = Rp. 415,306,428.2

Dari perhitungan diatas menurut UU PPN No. 11 tahun 1994 pasal 9 ayat 4, pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu Masa Pajak tampak selalu

lebih besar dari pada pajak keluaran yang telah dipungut, maka selisilnya merupakan kelebihan pajak yang dimintakan kembali atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Sedangkan menurut UU PPN No. 11 tahun **1994** apabila kelebihan pajak tersebut terjadi dalam Masa Pajak akhir tahun buliu. maka kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan restitusi.

4.2.2.1. Proses Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut UU PPN No. 11 tahun **1994** pasal **16** b ayat 2, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau **JKP** yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan PPN masukan yang dibayarkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada saat proses pembelian BKP, harus dikreditkan dengan PPN Keluaran yang ditarik oleh PKP pada saat penjualan BKP.

Syarat utama pengkreditan pajak adalah adanya Faktur Pajak Standar dan PIUD untuk barang-barang impor. Dan menurut UU PPN No. 11 tahun **1994** pasal **13**, faktur pajak bersifat wajib yang merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan BKP atau oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai pada saat **impor** Barang Kena Pajak.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu jumlah pajak masukan yang boleh atau diperkenankan menjadi pengurang atas pajak keluaran. Jadi tidak semua pajak masukan yang telah dibayar pada waktu pembelian boleh dikurangkan ke pajak keluaran. Seperti telah dijelaskan pada awal pembahasan

ini, UU Perpajakan memiliki kriteria atau pedoman dalam menentukan **besarnya pajak** masukan yang dapat dikreditkan yang dimmuskan sebagai berikut :

$$\text{➤ } \frac{\text{Penjualan kepada PKP}}{\text{Total penjualan}} \times \text{Pajak Masukan (PM)}$$

$$\text{➤ } \frac{\text{Ekspor}}{\text{Total penjualan}} \times \text{Pajak Masukan (PM)}$$

Berdasarkan ketentuan tersebut maka **pajak** masukan yang dikreditkan **oleh PT. Aneka Era Bru adalah** sebagai berikut :

➤ Masa Pajak Oktober 1999:

✳ Pajak Masukan yang dapat dikreditkan :

$$- \text{ Atas ekspor} = \frac{2,182,746,607}{3,315,708,962} \times 414,719,653.6 = \text{Rp. } 273,011,873.82$$

$$- \text{ Atas penjualan BKP kepada PKP}$$

$$= \frac{606,368,030}{3,315,708,962} \times 414,719,653.6 = \text{Rp. } 75,842,826.44$$

$$\begin{array}{r} 3,315,708,962 \\ \hline + \\ \hline = \text{Rp. } 348,854,700.26 \end{array}$$

➤ Masa Pajak November 1999:

✳ Pajak Masukan yang dapat dikreditkan :

$$- \text{ Atas ekspor} = \frac{2,097,401,230}{4,028,318,318} \times 395.938,513.2 = \text{Rp. } 206,151,018.62$$

$$4,028,318,318$$

Atas penjualan BKP kepada PKP

$$\begin{array}{rcl}
 = \underline{1,416,306,736} & \times 395,938,513.2 & = \text{Rp. } 139,207,068.31 \\
 4,028,318,318 & & \underline{\hspace{10em} +} \\
 & & = \text{Rp. } 345,358,086.93
 \end{array}$$

➤ Masa Pajak Desember 1999:

✱ Pajak Masukan yang dapat dikreditkan :

$$\begin{array}{rcl}
 - \text{ Atas ekspor} & = \underline{2,231,480,469} & \times 415,306,428.2 & = \text{Rp. } 264,430,369.38 \\
 & 3,504,696,474 & &
 \end{array}$$

- Atas penjualan BKP kepada PKP

$$\begin{array}{rcl}
 = \underline{926,711,174} & \times 415,306,428.2 & = \text{Rp. } 109,815,246.62 \\
 3,504,696,474 & & \underline{\hspace{10em} +} \\
 & & = \text{Rp. } 374,245,616.00
 \end{array}$$

4.2.2.2. Proses Perhitungan Kompensasi PPN

Dari hasil perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan diatas maka PPN PT. Aneka Era Baru yang harus dibayar atau lebih bayar adalah sebagai berikut :

➤ Masa Pajak Oktober 1999

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Pajak keluaran} & & = \text{Rp. } 270.934.093,2 \\
 \text{Pajak masukan} & & = \text{Rp. } 414,719,653.6 \quad - \\
 & & \underline{\hspace{10em}} \\
 \text{Pajak yang lebih bayar} & & = \text{Rp. } 143,785,560.4 \\
 \text{Pajak lebih bayar dari bulan September} & & = \text{Rp. } 203,836,708.4 \quad + \\
 & & \underline{\hspace{10em}} \\
 \text{Kompensasi ke bulan November} & & = \text{Rp. } 347,622,268.8
 \end{array}$$

➤ Masa Pajak November 1999

Pajak keluaran	= Rp. 261,201,158.2
Pajak masukan	= Rp. 395,938,513.2 -
Pajak yang lebih bayar	= Rp. 134,737,355
Pajak lebih bayar dari bulan Oktober	= Rp. 347,622,268.8 +
Kompensasi ke bulan Desember	= Rp. 482,359,623.8

➤ Masa Pajak Desember 1999

Pajak keluaran	= Rp. 257,798,530
Pajak masukan	= Rp. 415,306,428.2 -
Pajak yang lebih bayar	= Rp. 157,507,898.2
Pajak lebih bayar dari bulan November	= Rp. 482,359,623.8 +
Kompensasi ke bulan Januari 2000	= Rp. 639,867,522

4.2.3. Penyajian PPN dalam Laporan Keuangan

Pada setiap akhir bulan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk menghitung PPN yang terutang dengan cara membandingkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam masa pajak yang bersangkutan.

Besarnya PPN yang terutang tersebut merupakan bagian dari perkiraan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan pada setiap akhir tahun.

Penyusunan neraca dimaksudkan untuk mengetahui posisi harta, kewajiban, modal perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Sedangkan perhitungan laba-rugi disusun untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang

diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu. Untuk lebih jelasnya bentuk laporan keuangan PT. Aneka Era Baru tahun 1999 dapat dilihat di Lampiran 1 dan Lampiran 2.

4.2.4. Prosedur Pencatatan PPN Sehubungan Dengan Pelaporan Dalam SPT Masa PPN

Dari pembukuan perusahaan yang menyajikan transaksi-transaksi yang terjadi, perusahaan dapat mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) untuk masa pajak yang bersangkutan sebagai laporan dan pertanggungjawaban perusahaan atas perhitungan PPN-nya.

Hal-hal yang diperhatikan perusahaan dalam mengisi dan memasukan SPT Masa PPN, yaitu sebagai berikut :

- Besarnya penyerahan BKP kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN :
Rp. 2,234,024,309
- Besarnya retur penjualan yang diterima perusahaan dalam bulan Desember :
Rp. 2,543,840
- Besarnya tarif, yaitu 10% dari jumlah penyerahan BKP kepada konsumen :
Rp. 236402,431
- Besarnya PPN retur penjualan : **Rp. 254,384**
- Besarnya PPN perolehan BKP impor yang dapat dikreditkan : **Rp. 2,347,599**
- Besarnya PPN perolehan BKP dalam negeri yang dapat dikreditkan : **RP. 16,057,815**
- Besarnya PPN retur pembelian : **Rp. 3,380,687**

- Besarnya kelebihan PPN dibulan Desember : Rp. 400,281,701
- Besarnya pajak yang lebih **bayar** : Rp. 192,158,381
- Besarnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan : Rp. 15,680,500

Pajak yang masih ~~hubungan~~ dibayar tersebut dapat terjadi apabila jumlah PPN Masukan lebih besar dari jumlah PPN Keluaran serta adanya kelebihan pajak di bulan lalu **yang** dikompensasikan pada masa **pajak** yang bersangkutan.

4.3. Analisis Dan pembahasan

Setelah melihat kondisi yang ada di perusahaan, pada sub bab ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang kondisi yang ada dalam perusahaan kemudian dibandingkan dengan teori yang ada pada bab II. Dari pembahasan tersebut akan diketahui perlakuan akuntansi PPN dalam perusahaan dan pengaruhnya dalam penyajian laporan keuangan.

4.3.1. Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap PPN

Seperti yang telah dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan mengenai perbandingan antara pendapatan dan **biaya**, dimana pembebanan biaya sedapat mungkin harus dihubungkan dengan pendapatan. Dari pengertian ini maka harus ada kriteria-kriteria untuk mendapatkan nilai biaya yang layak untuk dibebankan dalam satu periode.

Untuk mendapatkan helayakan ekonomis dalam membandingkan pajak masukan dan **pajak** keluaran maka harus ada penerapan dari **dasar-dasar** perbandingan baik yang berupa hubungan sebab akibat, alokasi sistematis maupun

pembebanan **biaya** pada perhitungan PPN khususnya dalam pembebanan pajak. masukan **ke** pajak keluaran.

Pajak masukan yang benar-benar dimanfaatkan untuk menghasilkan pajak keluaran, pajak masukan inilah yang akan dibebankan dalam periode yang bersangkutan. Salah **satu** cara yang boleh dibebankan dalam satu periode yaitu dengan membagi pajak masukan sesuai dengan pajak keluaran yang terjadi (hubungan sebab akibat). Beberapa bagian yang dimanfaatkan untuk ekspor, berupa bagian yang dimanfaatkan untuk dijual pada Pengusaha Kena Pajak. Khususnya untuk bagian yang terakhir yaitu yang dimanfaatkan untuk dijual pada bukan PKP, karena tidak ada pendapatan atau pajak keluaran yang dihasilkan maka pajak masukan yang merupakan bagian dari **hal** ini selayaknya tidak dibebankan.

Teknik perhitungan dari hal tersebut akan tampak dalam transaksi PT. Aneka Era Baru sebagai berikut : Bulan Oktober 1999, total pembelian BKP adalah sebesar Rp. **4,308,046,994**. PT. Aneka Era Baru dalam menghitung PPN bulan Oktober adalah dengan mengkreditkan seluruh pajak masukannya ke pajak keluarannya. Untuk mendapatkan hasil perhitungan PPN yang tepat maka pajak masukan tidak boleh dikreditkan atau dikurangkan pada penjualan yang tidak tertera pajak keluaran.

Oleh sebab itu harus ada proporsi yaitu berapa persen yang terkena pajak keluaran. **Dari** prosentase tersebut maka pajak masukan harus dikreditkan sebesar nilai tersebut.

Dalam satu periode pemberian pisah batas (*cut off*) sangat diperlukan, agar pembebanan pajak masukan tidak melebihi nilai yang seharusnya. Pisah batas yang dilakukan pada pajak masukan terjadi apabila dalam **satu** periode, pembelian lebih besar daripada penjualannya. Kelebihan pembelian BKP tersebut, oleh fiskus dianggap menimbulkan sisa persediaan BKP.

Pisah batas pada pajak masukan dicari dengan menentukan berapa pajak masukan yang terjadi, kemudian dari jumlah yang ada dimanfaatkan untuk menghasilkan pajak keluaran yang menyertai penjualan BKP maka sisanya bukan merupakan beban periode tersebut.

Perhitungan yang harus melibatkan pemisahan batas (*cut off*) tersebut terlihat pada transaksi PT. Aneka Era Baru pada bulan Oktober dan Desember **1999**. Dimana pembelian BKP bulan Oktober **1999** sebesar Rp. **4,308,046,994** sedangkan total penjualannya sebesar Rp. **3,315,708,962**. Dari pembelian tersebut total pajak masukan adalah sebesar Rp. **430,804,699.4**. Kelebihan pembelian BKP dari penjualannya yaitu sebesar Rp. **160,850,458**. Jumlah tersebut dalam istilah pajak disebut sisa persediaan BKP, seolah-olah dijual untuk masa berikutnya. Dalam sisa persediaan BKP ini mengandung pajak masukan sebesar **10%** yaitu Rp. **16,085,045.8**.

Untuk menghasilkan ketetapan dalam perbandingan pajak masukan dan pajak keluaran maka pajak masukan sebesar Rp. **16,085.045.8** ini tidak boleh dikreditkan ke pajak keluaran bulan Oktober **1999**, sehingga pada bulan Oktober **1999** total pajak masukan sebesar Rp. **430.804.699.4** harus dikurangi dengan Rp.

169085,04 Hasil pengurangan yaitu sebesar Rp. 414.719,653.6 merupakan **pajak** masukan yang dapat dikreditkan dalam bulan November 1999.

4.3.2. Analisis Terhadap Penyajian Akuntansi Dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan sebagai tahap akhir dari suatu prosedur akuntansi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah prinsip penetapan beban dan pendapatan. Penetapan beban dan pendapatan yang tidak sesuai akan menimbulkan penilaian dan penafsiran yang salah bagi pemakainya.

Perkiraan Persediaan

Pada neraca sisi aktiva lancar terdapat perkiraan persediaan barang. Istilah persediaan menunjukkan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Dari definisi ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut dimiliki oleh perusahaan. Namun pada kenyataannya barang-barang tersebut telah berpindah tangan pada pelanggan atau pembeli. Oleh karena itu perusahaan sebenarnya tidak lagi mempunyai hak atas persediaan barang tersebut. Perkiraan ini timbul karena pajak masukan atas BKP yang telah dikreditkan oleh perusahaan tetapi pembuatan faktur pajak keluaran pada pembeli ditunda.

Berikut jurnal-jurnal yang dibuat oleh PT. Aneka Era Baru yang berkaitan dengan perkiraan persediaan :

- Jurnal pada saat terjadi pembelian BKP adalah sebagai berikut :

Persediaan barang	Rp. 10,717,064,408
PPN Masukan	Rp. 1,071,706,440.8
Utang dagang	Rp. 11,788,770,848.8

- Jurnal pada saat terjadi penjualan BKP adalah sebagai berikut :

Piutang dagang	Rp. 63,619,499,238.9
PPN Keluaran	Rp. 5,783,590,839.9
Penjualan	Rp. 57,835,908,399

- Jurnal pada saat terjadi retur penjualan BKP adalah sebagai berikut :

Retur Penjualan	Rp. 47,611,688
PPN Keluaran	Rp. 4,761,168.8
Piutang dagang	Rp. 52,372,856.8

Menurut undang-undang perpajakan apabila pada suatu kurun waktu tertentu pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka akan terjadi kelebihan pembayaran PPN yang mana atas kelebihan tersebut oleh perusahaan selalu dikompensasikan pada masa pajak bulan berikutnya.

Perkiraan Piutang Usaha

Piutang usaha secara umum diartikan sebagai klaim yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan kas. Oleh karenanya pengakuan atas piutang usaha ini berkaitan erat dengan pengakuan pendapatan. Apabila pendapatan dicatat pada saat proses menghasilkan **laba** telah selesai dan terealisasi, maka piutang yang berasal dari penjualan diakui pada saat hak **milik** atas barang beralih pada pembelinya.

Faktur pajak penjualan seharusnya juga dibuka pada tanggal yang sama dengan saat penyerahan BKP tersebut atau paling lambat 30 hari sejak diserahkan dan dilunasinya harga barang tersebut.

Perkiraan Pajak Dibayar Dimuka

Perkiraan pajak dibayar dimuka pada sisi aktiva lancar merupakan perhitungan untuk mencatat kelebihan pembayaran PPN. Jumlah perkiraan pajak dibayar dimuka yang tampak sangat besar ini disebabkan oleh jumlah PPN masukan yang telah dilunasi oleh perusahaan dan telah dikreditkan dalam surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai perusahaan yang tidak seimbang dengan pajak keluaran yang dibukukan sebagai akibat dari penundaan penerbitan faktur Pajak Keluaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Adapun jurnal yang dibuat oleh PT. Aneka Era Baru pada saat setoran PPN masa :

PPN Keluaran	XXX
PPN Masukan	XXX
Kas / Bank	XXX

Bila jurnal PPN masukan dalam sebuah masa pajak lebih besar **daripada** PPN keluaran maka akan terjadi kelebihan pembayaran pajak, dimana kelebihan itu dapat diperhitungkan kembali pada masa pajak berikutnya. Jurnal yang dibuat bila terjadi kelebihan PPN dalam suatu masa pajak :

Piutang PPN	Rp. 192.158.381
PPN Keluaran	Rp. 223.148.047
PPN Masukan	Rp. 41 5.306.428

4.3.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan dan prosedur perhitungan PPN dalam undang-undang yang berlaku serta hasil penerapan oleh perusahaan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

Sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka selanjutnya PT. Aneka Era Baru menerapkan perhitungan PPN dengan berpedoman pada undang-undang perpajakan yang berlaku, namun pada kenyataannya PT. Aneka Era Baru belum menerapkan prosedur perhitungan PPN secara tepat dan prosedur pencatatan akuntansinya tidak sesuai dengan prosedur pencatatan akuntansi yang terkandung di dalamnya, **hal** ini akan berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan. Khususnya atas pengakuan pendapatan dan biaya serta penyajiannya dalam laporan laba rugi perusahaan, maka **hal** ini akan menyebabkan informasi keuangan perusahaan yang disampaikan pada pemakai laporan keuangan akan menyesatkan, dan tidak dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang baik.

PT. Aneka Era Baru belum melaporkan jumlah penjualan' ekspor dalam laporan SPT Masa PPN untuk bulan Oktober sebesar Rp. **606,368,030** : **bulan** November sebesar Rp. **1,416.306,736** ; bulan Desember sebesar Rp. **926.711.174**. PT. Aneka **Era** Baru belum menghitung PPN Keluaran terutang atas penyerahan BKP kepada bukan PKP dimana jumlah penyerahan yang belum dilaporkan dalam SPT untuk bulan Oktober sebesar Rp. 526,594,325 ~~bulan~~ **bulan** November sebesar Rp. **514,610.352** ; **bulan** Desember sebesar Rp. **346,504,831**.

PT. Aneka Era **Baru** tidak melakukan / membuat faktur pajak pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dimana seharusnya pajak sudah terhitung pada waktu penyerahan barang, walaupun hanya baru dibayar kemudian. Hal ini dilakukan untuk perusahaan atas permintaan pembeli, selain **itu** agar pembeli tetap setia sebagai langganan perusahaan. Sebagai dampaknya, karena PPN harus dibayar dengan batas waktu tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir atau setelah dibuat faktur pajak, sedangkan faktur pajak harus dibuat selambat-lambatnyapada saat penerimaan pembayaran.

Dan setelah dibuat faktur pajak, walaupun harga barang yang telah dijual belum diterima, maka pengusaha kena pajak sudah harus menyetorkan PPN itu ke kas negara, karena jika hal **ini** tidak dilakukan maka akan didenda. Ini berarti bahwa PKP dalam keadaan demikian harus menggunakan modal lebih dari yang sudah dimiliki, dan jika ia tidak dapat menambah modalnya yang diperlukan untuk membayar PPN **dari** modal sendiri maka PKP akan utang kepada bank.

Utang ini membawa konsekuensi untuk membayar bunga, hal mana berarti bahwa ini akan memberatkan PKP. Maka dampak negatif dalam PPN bahwa pada umumnya PKP memerlukan modal tambahan agar PKP dapat memenuhi kewajiban pajaknya pada waktunya. Tetapi dilain pihak beban menjadi bertambah karena PKP harus membayar dari modal yang dipinjam itu.

Dampak lebih lanjut bagi intern perusahaan dalam hal penundaan pembuatan faktur pajak keluaran adalah mengakibatkan laporan keuangan yang disusun perusahaan ini menunjukkan *overstated* atau understated, **serta** tidak

adanya konsistensi dalam penyusunan maupun penyajian laporan keuangan kepada para pemakainya.

Dimana hal ini akan dapat menimbulkan penilaian dan penafsiran yang salah bagi para pemakainya. Dan pada akhirnya akan mempengaruhi operasional perusahaan karena cash **flow** perusahaan yang tidak seimbang.

Dalam hal ini perusahaan agar lebih memperhatikan pencatatan dan pembukuannya untuk menghasilkan perhitungan PPN yang tepat maka sebaiknya harus melibatkan prinsip penetapan beban dan pendapatan (*matching cost against revenue*). Untuk menghindari pinjaman modal untuk bayar pajak tersebut. Dan sebaiknya tidak dilakukan penundaan atas pembuatan faktur agar tidak mengakibatkan ketidakwajaran laporan keuangan dan penafsiran yang salah bagi para pemakainya.

Pajak masukan yang terjadi dalam **satu** periode oleh PT. Aneka Era Baru tidak dibebankan secara langsung pada periode tersebut. Dimana mengakibatkan pajak masukan selalu lebih besar dari pajak keluarannya sehingga selalu timbul kelebihan bayar dan dampaknya arus kas perusahaan tidak efektif.

Dengan demikian pajak masukan yang terjadi dalam suatu periode tersebut harus dipisah berdasarkan kategori pajak keluaran yang dihasilkan maupun berdasarkan manfaat yang diberikan oleh pajak masukan sesuai periodenya.

Kelebihan bayar yang dihasilkan dari PPN PT. Aneka Era Baru sebaiknya direstitusi sehingga dengan demikian hasil restitusi merupakan pemasukan dana yang dapat digunakan untuk operasional dengan tujuan

meningkatkan ekspor. Bila kelebihan bayar tersebut dikompensasikan dari masa ke masa maka jumlah tersebut didalam laporan keuangan hanya sekedar nilai tanpa ada fungsi yang nyata.